

DESKRIPSI KEMAJUAN RB
POKJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEMESTER I DAN II TAHUN 2019

PENGANTAR

Sesuai arahan Ketua Tim Reformasi Birokrasi BKN bahwa setiap kemajuan atau perkembangan Reformasi Birokrasi (RB) harus terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Peraturan Perundang-undangan telah menyiapkan Deskripsi Kemajuan RB Semester I dan II Tahun 2019. Hal ini menunjukkan keseriusan Pokja dalam meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN.

Deskripsi Kemajuan RB ini secara garis besar menggambarkan realisasi atau capaian yang telah dilakukan Pokja dibandingkan dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang telah ditetapkan. Setiap capaian didukung dengan bukti-bukti dokumentasi yang relevan.

Capaian ini tentunya dapat diperoleh berkat dukungan dan komitmen seluruh anggota Pokja dan seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, Tim Pelaksana RB BKN dari Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusinya dalam mewujudkan kemajuan pelaksanaan RB BKN.

Jakarta, November 2019

Ketua Pokja

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Julia Leli Kurniatri

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan penataan peraturan perundang-undangan, BKN telah melakukan berbagai terobosan dalam area hukum, regulasi, atau legislasi, antara lain dengan melakukan proses harmonisasi dan pengendalian penyusunan perundang-undangan yang didokumentasikan dalam suatu laporan yang rinci, lengkap, dan komprehensif, sehingga dapat dipahami secara cepat dan mudah oleh pihak-pihak di luar BKN termasuk dalam rangka penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN RB.

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor Nomor 11/KEP/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKN, disebutkan bahwa Tim Pelaksana antara lain berkewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan secara berkala hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN kepada Tim Pengarah RB BKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional.

C. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang rinci, lengkap dan komprehensif mengenai capaian-capaian yang telah diraih BKN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan pada semester I dan II Tahun 2019.

D. Rencana Aksi Tindak Lanjut Pokja Tahun 2019

Selain tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana dilakukan pada tahun 2018, terdapat rencana aksi yang akan dijalankan dalam rangka penguatan penataan peraturan Perundang-undangan di tahun 2019, yaitu :

1. Terkait Harmonisasi

- a. Review dan Pemetaan Kelompok Peraturan Perundang-undangan
(Target Waktu Januari-Mei 2019)

Akan dilakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap sudah tidak relevan, bertentangan, atau potensial untuk diubah atau dicabut.

- b. Perluasan stakeholder (Unit Kerja dan Instansi terkait) dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

(Target Waktu Januari-Desember 2019)

Jika pada tahun 2018 keterlibatan stakeholder lebih didominasi oleh unit kerja di BKN, maka di tahun 2019 diharapkan lebih banyak lagi unit kerja dan instansi yang dilibatkan contoh: Kanreg BKN, Kementerian Luar Negeri, BUMN, BUMD, LPP, dan lembaga/institusi pemerintah lainnya.

2. Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan Perundang-undangan
 - a. Penyempurnaan SOP dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan Instrumen Hukum lainnya

(Target Waktu Januari-Juni 2019)

SOP penyusunan Peraturan BKN akan diperbaiki antara lain dengan memasukkan kegiatan penyusunan kajian akademik dan permohonan paraf koordinasi dalam penyusunan Peraturan BKN
 - b. Penyiapan format Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan Instrumen Hukum lainnya

(Target Waktu Januari 2019)

Untuk memudahkan unit kerja dalam mengusulkan draf rancangan, dibuat suatu format yang baku sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, sehingga terdapat keseragaman dari setiap unit kerja yang mengusulkan draft rancangan.
 - c. Penyusunan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

(Target Waktu Juni 2019)

Untuk menjamin ketepatan bentuk pengaturan dari suatu substansi/materi muatan, diperlukan suatu kajian akademik yang berfungsi sebagai filter layak/tidaknya usul rancangan diatur dalam Peraturan BKN.
 - d. Optimalisasi fungsi Monitoring dan Evaluasi dalam rangka menyerap aspirasi kebutuhan dan evaluasi terhadap regulasi kepegawaian

(Target Waktu Februari-Oktober 2019)

Menitikberatkan monitoring dan evaluasi sebagai media penyerap aspirasi, saran, dan masukan guna memperkaya bahan dan informasi dalam penyusunan regulasi kepegawaian.

e. Pembangunan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

(Target Waktu Juli 2019)

Rencananya akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Pengelola JDIH BKN
- 2) Pelatihan Tim Pengelola JDIH
- 3) Evaluasi dan peremajaan regulasi secara berkala

f. Terwujudnya program legislasi BKN

(Target waktu November 2019)

A. Kriteria Keberhasilan

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi, ditetapkan kriteria keberhasilan. Berikut kriteria keberhasilan masing-masing rencana aksi/kegiatan yang dilaksanakan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target/ Waktu	Penanggung Jawab
1	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;	Tertatanya peraturan perundangan di bidang kepegawaian (sehingga tidak tumpang tindih, pertentangan, konflik norma)	1 Dokumen/ Per Periode Penilaian	Direktorat Perundang-undangan
2	Sistem Pengendalian Penyusunan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;	Terciptanya sistem penyusunan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian yang efektif dan efisien	1 Dokumen/ Per Periode Penilaian	Direktorat Perundang-undangan

No	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target/ Waktu	Penanggung Jawab
3	Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu di Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi baik dengan Pusat maupun Anggota JDIH	1 Dokumen/ Per Periode Penilaian	Direktorat Perundang-undangan

B. Capaian Kegiatan Semester I dan II Tahun 2019

Capaian kegiatan Pokja untuk kuartal I Tahun 2019 (sampai dengan bulan April 2019) telah disampaikan dalam laporan terdahulu, dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian RB Kementerian PAN dan RB pada bulan Agustus 2019. Sehingga dalam Deskripsi ini hanya disampaikan capaian kegiatan dari bulan Mei sampai dengan November 2019.



Suasana penilaian RB Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan oleh Tim Kementerian PAN dan RB

Adapun sampai dengan bulan November 2019 kegiatan yang telah dilakukan oleh Pokja yaitu dititikberatkan pada sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, yang antara lain berupa:

1. Penyusunan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Kajian akademik dibutuhkan untuk menjamin ketepatan bentuk pengaturan dari suatu substansi/materi muatan, diperlukan suatu kajian akademik yang berfungsi sebagai filter layak/tidaknya usul rancangan diatur dalam Peraturan BKN. Oleh karena itu telah diedarkan Memo Dinas Deputi PMK yang berisi kewajiban kepada setiap unit kerja di BKN untuk membuat kajian akademik (analisis kebutuhan regulasi) kepada setiap unit kerja yang mengusulkan rancangan Peraturan BKN.

Feedback dari unit kerja yang berbentuk Kajian Akademik atau Analisis Kebutuhan Regulasi tercantum dalam **Lampiran II**

2. Perluasan Stakeholder dalam Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Sesuai rencana semula, penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara kini melibatkan banyak pihak di luar BKN, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, BUMN, BUMD, LPP, Beberapa Instansi Daerah dan lembaga/institusi pemerintah lainnya.

Keterlibatan stakeholder dalam Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tercantum dalam **Lampiran II**

3. Penyempurnaan SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dengan adanya kajian akademik dan paraf koordinasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di BKN tentunya memerlukan penyesuaian standar operasional prosedur yang berlaku.

Adapun SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah disempurnakan tercantum dalam **Lampiran III**

4. Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)

Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, BKN telah melakukan upaya pemanfaatan JDIH yang menghubungkan seluruh informasi dan dokumentasi hukum dalam suatu sistem yang terpadu.

Dan kini, JDIH BKN telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dikelola BKN, sehingga memudahkan para pihak dalam pencarian dokumentasi hukum. Atas upaya itu BKN diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Khusus untuk JDIH BKN, bahkan kita ditambahkan fitur uji publik, dimana admin JDIH mengunggah file rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, dan publik dapat memberikan masukan, saran, pendapat berbasis web service.

Secara berkala, dilakukan juga pelatihan terhadap pengelola JDIH BKN demi terwujudnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum BKN yang berkualitas, dengan difasilitasi oleh pihak BPHN Kemenkumham maupun oleh Tenaga IT BKN.

Evidence dari Pemanfaatan JDIH BKN tercantum dalam **Lampiran IV**

EVIDENCE

CAPAIAN KEGIATAN POKJA BULAN MEI-NOVEMBER 2019

Lampiran I

Kajian Akademik dalam bentuk analisis kebutuhan regulasi sudah mulai diimplementasikan dalam pembentukan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Salah satunya contoh ketika Direktorat Jabatan ASN mengusulkan satu draf rancangan Peraturan BKN, dilampirkan juga Kajian Akademik yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Direktorat Peraturan Perundang-undangan apakah tepat/tidak usul rancangan tersebut diatur dengan Peraturan BKN.

CONTOH:

ANALISIS KEBUTUHAN REGULASI
RANCANGAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

A. Pendahuluan

Terkait dengan adanya regulasi kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang manajemen PNS pasal 67 sampai dengan pasal 86 yang menyatakan bahwa kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang, Kriteria, dan akuntabilitas jabatan fungsional. Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi subdirektorat jabatan ASN bidang perekonomian yang melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang membawahi beberapa kementerian unit keuangan dan PU serta unit Sumber Daya Alam.

Subdit bidang perekonomian telah menyelesaikan beberapa Draft kebijakan teknis jabatan fungsional yang baru di Kementerian Perhubungan.

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan Pasal 47, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan.

2. Dasar Pembentukan

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektor Keamanan Penerbangan.
3. Landasan filosofis, yuridis yaitu Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektor Keamanan Penerbangan.

B. Ruang Lingkup

Sistematika rancangan Peraturan BKN Jabatan Fungsional Inspektor Keamanan Penerbangan adalah :

1. Batang Tubuh

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | Ketentuan Umum |
| BAB II | : | Kedudukan, Tugas Jabatan, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang |
| BAB III | : | Unsur Kegiatan, Sub Unsur Kegiatan dan Uraian Kegiatan |
| BAB IV | : | Kewenangan Pengangkatan |
| BAB V | : | Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan dalam jabatan Fungsional |
| BAB VI | : | Uji Kompetensi |
| BAB VII | : | Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji |
| BAB VIII | : | target Angka Kredit Minimal dan Angka Kredit Kumulatif |
| BAB IX | : | Penilaian Kinerja dan Hukuman Disiplin |
| BAB X | : | Pengusulan, penilaian dan Penetapan Angka Kredit |
| BAB XI | : | Tim penilai dan tim teknis |
| BAB XII | : | Kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat |
| BAB XIII | : | Pendidikan dan pelatihan |
| BAB XIV | : | Pemberhentian dan pengangkatan kembali |
| BAB XV | : | penutup |

2. Lampiran I : Penjelasan Contoh

3. Lampiran II sampai dengan Lampiran XVII contoh formulir

C. Analisis dan urgensi peraturan.

1. Adanya pengembangan SDM dan karir PNS melalui pembentukan jabatan fungsional baru.
2. Adanya amanat yang disampaikan, melalui peraturan, Menpan masing-masing jabatan fungsional.

D. Penutup

Jabatan Jabatan Fungsional Inspektor Keamanan Penerbangan adalah jabatan baru yang diamanatkan dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektor Keamanan Penerbangan yang menjadi tugas dan fungsi pada Subdirektorat jabatan ASN bidang perekonomian.

Direktur Jabatan ASN



Aidu Taūhid

Lampiran II

Dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai Juknis Pemberhentian PNS dan Penugasan Khusus PNS pada Instansi Pemerintah, BKN mengundang beberapa perwakilan Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM untuk memberikan pendapat, masukan, saran. Selain dari instansi luar dilibatkan pula pejabat Kepala Kantor Regional BKN.



NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA/INSTANSI	TANDA TANGAN
19.	Kurniaedi	196110221984051001	KANREG III PLG	
20.	Afiati	198712072011012002	BPSDA Kota Bogor	
21.	Dian Septiani	109509152017082001	BPSDA Kota Bogor	
22.	Bonita Sastriani	10630525198401001	Bapda Pagn	
23.	Heruwan	136263151984031001	Kawag I	
24.	Danar Arie	198604142005121003	BKPSDM Kota TNG	
25.	Mursi Sibang	136301311985091001	Kawag V	
26.	Sukharroe	196211021991032001	Persitba JPA	
27.	Muslim Albin	15731125199031001	KUMHAM	
28.	P. Parito	147309101994091001	Dolec	
29.	Heri	16730402198031001	Bapda	
30.	Muhammad	196410031987122001	Kawag II Bandung	
31.	Dadan	1984050110002	Dir SM	
32.	Surjiono Sur	08111887777	Kesprbina Depa	
33.	M. Zulfikar	1603120220180118007	BKPP Kab. Bogor	
34.	Ananda Risty	165206242016050809001	"	
35.	Mendunwuh	196906011997092001	Dir Waduk Deli	
36.	Santyn		Dit Wardat Detik	
37.	Rajoli Hikmat	197309052006091009	Dit Kompenas	
38.	Sukarna	196506051991032001	Dit Pensiun	
39.	Andi Andi Asih	197108051994032001	Dit SKK	
40.	Samuel HI	197605142001021001	Dit Ponden	

Daftar hadir kegiatan uji publik/konsultasi publik dalam penyusunan rancangan Peraturan BKN.

Konsultasi publik juga dilakukan terhadap penyusunan NSPK di beberapa instansi pemerintah yang meminta pengayaan substansi dari BKN, sehingga ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Foto bawah kiri:

Konsultasi penyusunan Perbup Kudus tentang Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemkab Kudus

Foto bawah kanan:

Uji Publik R-Perban BKN tentang Tata Cara Penugasan PNS di wilayah Kerja Kanreg III BKN Bandung.

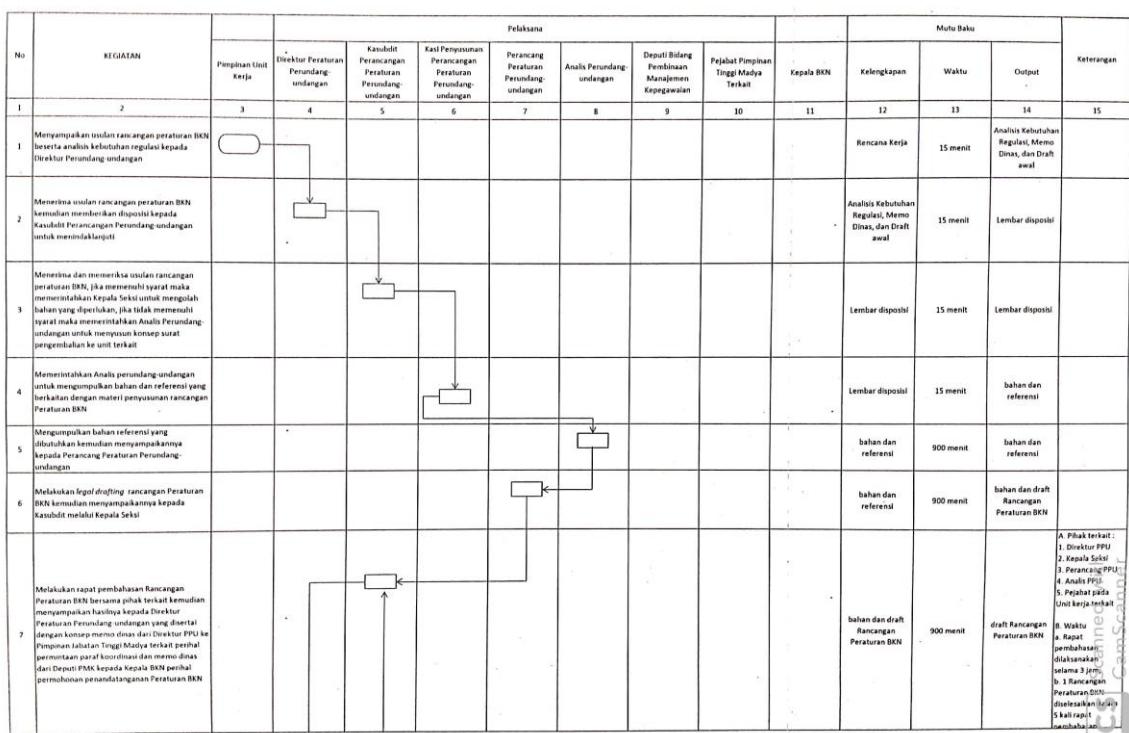


Lampiran III

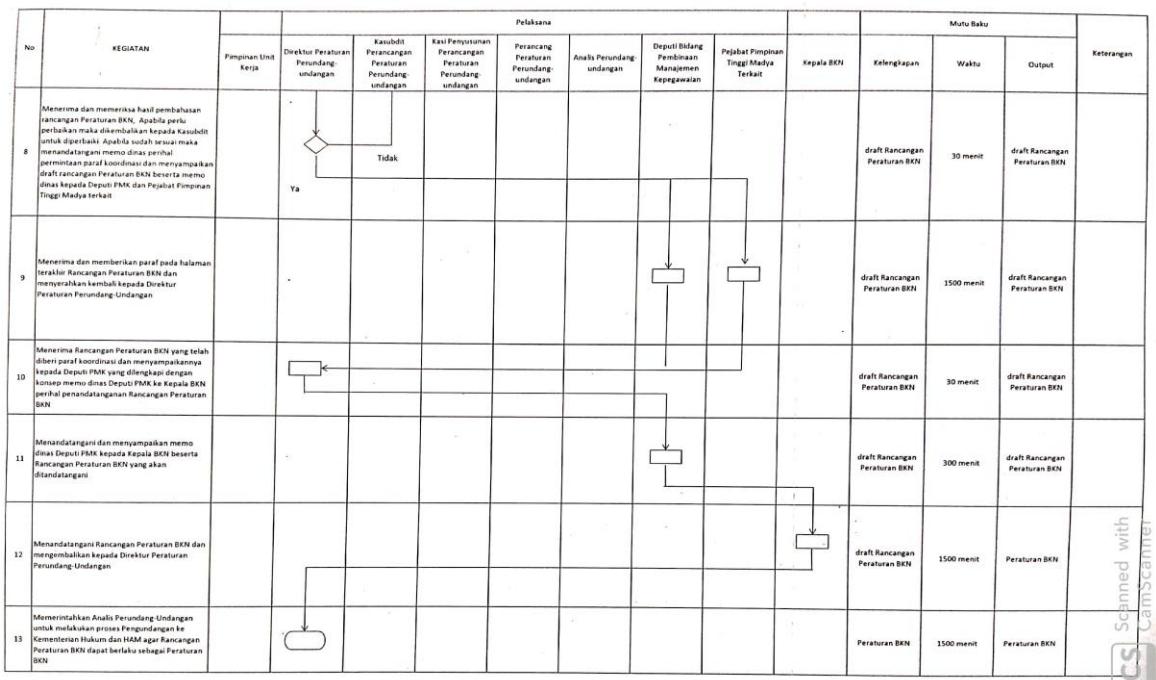
SOP Penyusunan Peraturan BKN yang telah disempurnakan

 <p>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEDEPUTIAN BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		<p>Nomor : 01/SOP/DIT.PPU/VII/2019</p> <p>Tanggal Pembuatan : 15 Desember 2014</p> <p>Tanggal Revisi : 9 Juli 2019</p> <p>Tanggal Efektif : 15 Juli 2019</p> <p>Disahkan oleh</p> <p style="text-align: right;">Direktur Peraturan Perundang-undangan</p> <p style="text-align: right;">Julia Leli Kurniati, S.H., M.H. NIP. 197004161994032001</p> <p>Nama SOP : Penyusunan Peraturan BKN</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</p>		<p>KUALIFIKASI PELAKUSA</p> <p>1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Peraturan Perundang-undangan. 2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 3. Memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>KETERKAITAN</p>		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>1. Peraturan perundang-undangan yang terkait; 2. Rencana Kerja Tahunan; 3. Komputer; 4. Scanner dan printer; dan 5. ATK.</p>
<p>PERINGATAN Apabila terjadi ketelambatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, maka akan berpengaruh dalam pelaksanaan sistem pembinaan FNS.</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

(1)



(2)

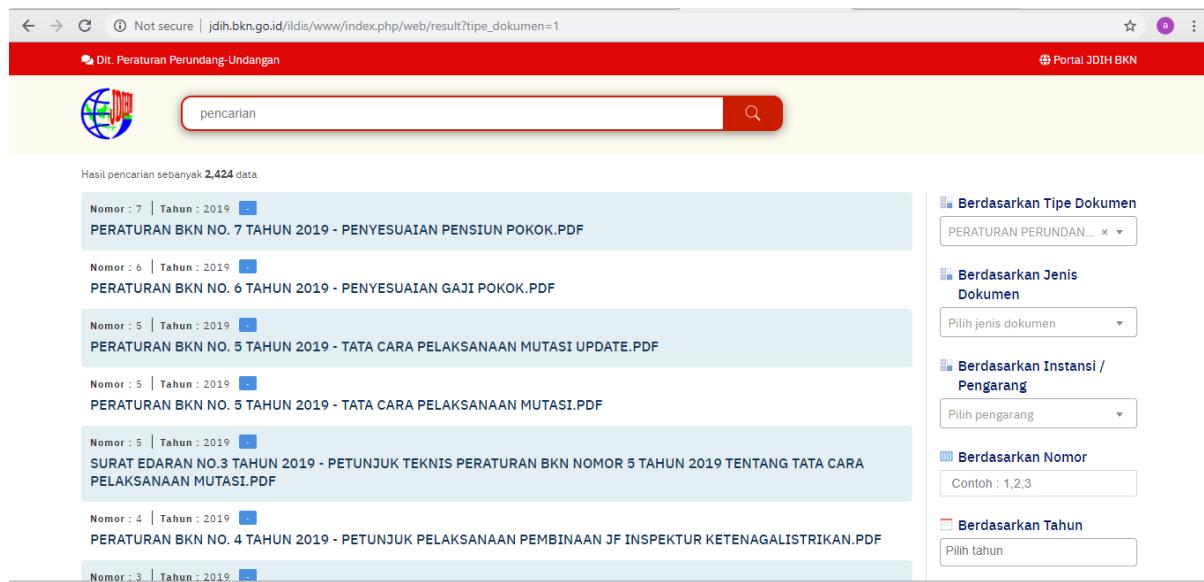


Scanned with
CamScanner

(3)

Lampiran IV

Progress Pemanfaatan JDIH BKN



Hasil pencarian sebanyak 2,424 data

Nomor : 7 | Tahun : 2019 PERATURAN BKN NO. 7 TAHUN 2019 - PENYESUAIAN PENSUIN POKOK.PDF

Nomor : 6 | Tahun : 2019 PERATURAN BKN NO. 6 TAHUN 2019 - PENYESUAIAN GAJI POKOK.PDF

Nomor : 5 | Tahun : 2019 PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 - TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI UPDATE.PDF

Nomor : 5 | Tahun : 2019 PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 - TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI.PDF

Nomor : 5 | Tahun : 2019 SURAT EDARAN NO.3 TAHUN 2019 - PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI.PDF

Nomor : 4 | Tahun : 2019 PERATURAN BKN NO. 4 TAHUN 2019 - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JF INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.PDF

Nomor : 3 | Tahun : 2019

Berdasarkan Tipe Dokumen
PERATURAN PERUNDANG...

Berdasarkan Jenis Dokumen
Pilih jenis dokumen

Berdasarkan Instansi / Pengarang
Pilih pengarang

Berdasarkan Nomor
Contoh : 1,2,3

Berdasarkan Tahun
Pilih tahun

Tampilan JDIH BKN, diakses dari www.jdih.bkn.go.id



Monday, August 13 2018

Uji Publik Rancangan Peraturan

Komentar dan Saran Anda sangat berharga bagi kami dalam menyusun Rancangan Peraturan. Silahkan kirimkan melalui email jdih@bkn.go.id atau isi form uji publik berikut :

Nama (required)

Perseorangan Organisasi

Email (required)

Judul Rancangan Peraturan

...

Masukan/saran/pendapat

Questions? Chat Now!

Offline - Leave a message

Tampilan Fitur Uji Publik pada web JDIH BKN



Penghargaan yang diberikan Menteri Hukum dan HAM kepada BKN



Kegiatan pelatihan pengelola JDIH BKN oleh Tim BPHN